



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3819-3827

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Persepsi Masyarakat Mengenai Program Bantuan Sembako di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Eko Yudianto^{1✉}, Imam Sucahyo², Normahanik³

Universitas Panca Marga

Email: ekoyunus2011@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat tentang program bantuan sembako yang dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Metode yang diterapkan dalam studi ini meliputi wawancara dengan penerima bantuan, pengelola program, dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen-dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sembako memberikan manfaat bagi sebagian warga, meskipun ada beberapa kendala terkait dengan kurangnya transparansi informasi dan ketidakmerataan dalam distribusi bantuan. Dua faktor utama yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap program ini adalah kejelasan informasi dan kondisi sosial di sekitar pelaksanaan program. Penelitian ini juga menyarankan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas program, termasuk perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai kriteria penerima bantuan dan peningkatan komunikasi antara penyelenggara dan masyarakat. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan program bantuan sosial di Kecamatan Balongpanggang.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Program Bantuan Sembako, Kecamatan Balongpanggang

Abstract

This study aims to explore the community's perception of the food assistance program implemented in Balongpanggang District, Gresik Regency. The methods used in this research include interviews with beneficiaries, program managers, and community members, as well as analysis of relevant documents. The findings indicate that the food assistance program has provided benefits to some residents, although there are several challenges related to a lack of information transparency and uneven distribution of aid. Two main factors influencing the community's views on this program are the clarity of information and the social conditions surrounding the program's implementation. This research also recommends steps to enhance the program's effectiveness, including the need for better socialization regarding the criteria for aid recipients and improved communication between organizers and the community. It is hoped that the results of this study can have a positive impact on the development of social assistance programs in Balongpanggang District.

Keywords: Community Perception, Food Assistance Program, Balongpanggang District

PENDAHULUAN

Program bantuan sembako merupakan salah satu inisiatif strategis dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi (Rifki, 2021). Melalui program ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses kebutuhan pokok yang memadai. Menurut data dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik (2022), ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai kecamatan, termasuk Kecamatan Balongpanggang, telah menerima bantuan sembako secara bertahap. Program ini sangat relevan dalam mengurangi kerentanan rumah tangga miskin terhadap krisis pangan yang mungkin terjadi.

Sejak diluncurkan, program sembako telah mengalami beberapa perubahan signifikan, baik dalam hal jumlah bantuan yang diberikan maupun sistem distribusinya (Lestari, 2021). Pada awalnya, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan, yang kemudian meningkat menjadi Rp150.000. Penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat digunakan untuk bertransaksi di e-warong yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, yang menekankan pentingnya efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi dampak program bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, studi oleh Azahroh *et al.*, (2022) mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Kebulen menunjukkan bahwa

penerima merasa terbantu secara finansial selama masa pandemi, dengan persepsi positif terhadap manfaat yang diberikan. Di sisi lain, penelitian Dewi (2022) di Kecamatan Taman, Kabupaten Malang, menyimpulkan bahwa program sembako berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Kajian-kajian yang telah dilakukan sejauh ini masih menunjukkan keterbatasan dalam menjangkau pemahaman yang lebih spesifik mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program sembako di wilayah administratif setingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Balongpanggang. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis skala luas seperti kota atau kabupaten, sehingga aspek-aspek kontekstual yang khas di tingkat lokal belum tergambarkan secara utuh (Setiawan, 2020). Hal ini mengindikasikan adanya ruang kosong dalam penelitian yang belum banyak disentuh, terutama terkait dengan bagaimana masyarakat di wilayah yang lebih kecil merespons program bantuan sosial dalam keseharian mereka (Geli & D'Agostino, 2019).

Perubahan dalam kebijakan, termasuk peningkatan jumlah bantuan dan variasi jenis bahan pokok yang disediakan, masih belum sepenuhnya dieksplorasi dari sudut pandang penerima manfaat. Hal ini terutama berkaitan dengan bagaimana mereka memandang keadilan dalam distribusi, kemudahan akses terhadap bantuan, serta transparansi dalam prosedur penyaluran. Selain itu, beberapa laporan tidak resmi mengindikasikan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat mengenai ketidakcocokan data penerima, adanya monopoli dalam penyediaan e-warong, serta minimnya informasi yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masalah-masalah ini berpotensi mengurangi efektivitas keseluruhan dari program yang ada (Hidayati, 2019).

Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan pandangan penerima manfaat terhadap kebijakan ini. Memahami persepsi mereka akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga program bantuan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan program sosial, persepsi masyarakat memainkan peran yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar menunjukkan tingkat kepuasan terhadap bantuan yang diberikan. Persepsi tersebut dapat merefleksikan penilaian masyarakat terhadap efektivitas, keadilan, serta transparansi program secara keseluruhan (Sari, 2020). Apabila persepsi yang terbentuk bersifat negatif misalnya karena distribusi bantuan dianggap tidak adil atau mekanisme penyaluran dirasa tidak transparan hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Kondisi

demikian dapat merusak citra program sosial itu sendiri dan bahkan melemahkan legitimasi kebijakan publik yang mendasarinya.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat di Kecamatan Balongpanggang memaknai pelaksanaan program sembako. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang berharga untuk mengisi kekosongan dalam literatur, sekaligus menawarkan masukan strategis bagi perbaikan implementasi program bantuan sosial di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif, yang dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai implementasi program bantuan sembako yang berlangsung di wilayah Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Pemilihan partisipan dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan menentukan informan berdasarkan kriteria yang dianggap paling mampu memberikan informasi relevan sesuai fokus kajian (Sugiyono, 2021). Kriteria tersebut merupakan penerima bantuan sembako yang, serta bersedia terlibat aktif dalam proses wawancara. Jumlah partisipan yang diwawancarai sebanyak 10 orang. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan bersifat kontekstual, *representatif*, dan mendalam (Moleong, 2019).

Dalam studi ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama (*human instrument*), sebagaimana lazim dalam pendekatan kualitatif, dan didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur (Miles, *et al.*, 2014). Guna memastikan validitas dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai pihak, termasuk penerima bantuan, pelaksana di lapangan, dan pihak desa, sementara triangulasi metode mencakup wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses distribusi bantuan.

Pengolahan data dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan analisis *interaktif* sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan ini melibatkan tahapan yang berlangsung secara terus-menerus, dimulai dari proses pengumpulan data, penyaringan informasi melalui reduksi data, penyajian dalam bentuk kategori atau tema, hingga penarikan kesimpulan yang logis dan menyeluruh. Sebagai langkah verifikasi akhir, peneliti menggunakan teknik *member checking*, yaitu mengonfirmasi hasil temuan kepada para informan guna memastikan bahwa interpretasi data telah mencerminkan kondisi dan pemahaman yang sebenarnya (Patton, 2022).

Selaras dengan tujuan utama penelitian ini yang ingin mengeksplorasi persepsi masyarakat Balongpanggung terhadap program bantuan sembako, peneliti menetapkan sejumlah indikator persepsi yang merujuk pada teori dari Bimo Walgito (2010), yang menguraikan bahwa persepsi terdiri dari tiga unsur pokok. Pertama, tahap penerimaan rangsangan, yaitu bagaimana individu menangkap informasi awal yang berkaitan dengan program. Kedua, tahap pemahaman, yaitu sejauh mana informasi tersebut diproses dan dimaknai secara pribadi oleh penerima bantuan. Ketiga, tahap evaluasi atau penilaian, yang mencerminkan sikap individu terhadap manfaat, keadilan, serta efektivitas program berdasarkan pengalaman nyata maupun persepsi sosial di sekitarnya. Ketiga aspek ini menjadi acuan utama dalam mengidentifikasi temuan serta membangun interpretasi hasil secara *komprensif* dalam konteks lokal masyarakat Kecamatan Balongpanggung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara mendalam dengan sepuluh responden yang merupakan penerima bantuan sembako menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap implementasi program di Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik, terbagi dalam dua kelompok besar. Di satu pihak, ada masyarakat yang menganggap program ini sangat bermanfaat karena mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di pihak lain, terdapat kelompok yang menyoroti sejumlah kelemahan, terutama pada aspek pelaksanaan dan mekanisme teknis program.

Jika dianalisis lebih dalam dengan mengacu pada teori persepsi yang diungkapkan oleh Bimo Walgito (2010), pandangan masyarakat mengenai program ini dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah fase penerimaan rangsangan, di mana masyarakat mulai mendapatkan informasi mengenai program bantuan sembako. Pada tahap ini, informasi yang diterima umumnya bersifat tidak resmi, seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau melalui percakapan antarwarga. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penyampaian informasi yang ada belum berjalan dengan optimal.

Dalam fase ini, masyarakat cenderung mengandalkan sumber informasi yang tidak terstruktur, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpahaman mengenai program tersebut. Ketika informasi tidak disampaikan melalui saluran resmi, ada risiko bahwa pesan yang diterima bisa jadi tidak akurat atau tidak lengkap. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki cara penyampaian informasi agar masyarakat dapat memahami program dengan lebih baik dan mengurangi potensi kebingungan yang mungkin timbul.

Kedua, pada fase pemahaman, masyarakat mulai memproses informasi yang diterima dan membangun pemahaman mengenai tujuan serta mekanisme program. Dalam kenyataannya, tingkat pemahaman di kalangan masyarakat sangat beragam; sebagian orang dapat memahami dengan baik maksud dan kriteria program, sementara yang lain merasa bingung atau meragukan keadilan dalam pelaksanaannya. Variasi dalam pemahaman ini menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap informasi yang jelas dan komprehensif. Beberapa warga mungkin dapat menangkap inti dari program dan kriteria yang ditetapkan, tetapi ada juga yang mengalami kesulitan dalam memahami hal tersebut, yang dapat menyebabkan keraguan terhadap keadilan dan transparansi program. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan komunikasi agar semua lapisan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang seragam dan jelas mengenai program yang ada.

Pada tahap ketiga, yaitu fase penilaian, masyarakat mulai mengevaluasi sejauh mana program yang dilaksanakan efektif dan adil. Banyak warga mengungkapkan bahwa mereka merasa terbantu oleh program tersebut, namun di sisi lain, ada juga yang menyoroti masalah ketidakakuratan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan yang dapat memicu kecemburuan sosial di antara anggota masyarakat.

Dalam fase ini, masyarakat tidak hanya melihat manfaat yang mereka terima, tetapi juga membandingkan situasi mereka dengan orang lain. Ketika beberapa individu merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya, sementara yang lain yang dianggap lebih mampu justru menerima bantuan, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan. Ketidakadilan dalam distribusi bantuan dapat menciptakan ketegangan sosial dan merusak hubungan antarwarga. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara program untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat dan merata, agar semua pihak merasa diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Temuan ini memperlihatkan proses terbentuknya persepsi masyarakat melalui tiga tahapan sebagaimana dijelaskan dalam teori persepsi tersebut, dimulai dari penerimaan informasi, pemahaman, hingga tahap evaluatif. Pada tahap awal, hambatan dalam komunikasi formal antara pelaksana dan warga menjadi kendala utama yang menyebabkan informasi tidak sampai secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan Azahroh *et al.*, (2022) yang menekankan pentingnya pola komunikasi dalam menentukan keberhasilan

penyaluran bantuan langsung tunai. Penyampaian informasi yang kurang sistematis berpotensi menciptakan ketidaktahuan atau kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dalam fase pemahaman, temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil yang diungkapkan oleh Dewi (2022), yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi mengenai kriteria penerima bantuan sering kali memicu spekulasi di kalangan masyarakat. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan anggapan bahwa pelaksanaan program tidak adil atau kurang transparan. Hal ini berujung pada munculnya persepsi negatif yang dapat merusak citra program secara keseluruhan.

Ketidajelasan informasi mengenai siapa yang berhak menerima bantuan dapat menciptakan kebingungan di masyarakat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas program. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas, mereka cenderung berasumsi bahwa ada ketidakadilan dalam proses seleksi penerima bantuan. Persepsi semacam ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap program, yang sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif bantuan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pihak penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan agar masyarakat dapat memahami dengan baik kriteria dan mekanisme program yang ada.

Sementara itu, pada tahap penilaian, masyarakat cenderung menilai program berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengamatan sosial mereka. Ketimpangan distribusi bantuan dan tidak adanya ruang partisipatif bagi masyarakat dalam memberikan masukan membuat program terkesan tertutup dan kurang responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ketika warga merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi, hal ini dapat menimbulkan rasa tidak memiliki terhadap program dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaannya.

Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, maka keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya bergantung pada mekanisme teknis distribusi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama pelaksana program perlu merancang strategi komunikasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan transparan. Sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar informasi terkait kriteria penerima, prosedur pelaksanaan, dan tujuan program dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Selain itu, evaluasi rutin yang melibatkan warga secara langsung sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan solusi, sehingga pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil wawancara serta pembahasan mendalam dengan sepuluh penerima bantuan sembako di Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki dua pandangan utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa bantuan sembako sangat bermanfaat dalam meringankan beban ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kedua menyampaikan kritik mengenai kurangnya transparansi informasi, ketidakmerataan dalam distribusi bantuan, dan ketidakadilan dalam penentuan siapa yang berhak menerima manfaat. Mereka juga menyoroti bahwa komunikasi yang tidak efektif dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi penghalang bagi keberhasilan program ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan jumlah informan yang terbatas dan sifat data yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah dan pelaksana program meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui saluran resmi yang lebih jelas dan merata. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang transparan mengenai kriteria dan mekanisme program, serta melaksanakan evaluasi rutin yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan meningkatkan efektivitas program. Untuk penelitian yang akan datang, disarankan agar jumlah sampel ditingkatkan dan melibatkan berbagai pihak yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menyelidiki faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap efektivitas program, termasuk pengaruh media sosial dan aspek budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahroh, N., Shulthoni, M., & Ahmad, A. (2022). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Kebulen selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(2), 123-135.
- Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 99-100
- Dewi, A. (2022). Evaluasi Program Sembako di Kecamatan Taman, Kabupaten Malang. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 15(1), 45-60.
- Gelli, A., & D'Agostino, A. (2019). The impact of school feeding programs on educational and health outcomes: A systematic review. *Journal of School Health*, 89(5), 389-398. <https://doi.org/10.1111/josh.12756>
- Hidayati, N. (2019). Dampak Program Bantuan Sembako Terhadap Kesejahteraan

- Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 12(2), 78-90.
- Lestari, P. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Gresik. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(3), 150-165.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai. (2017). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017>
- Rizki, F. (2021). Kesejahteraan Masyarakat dan Program Bantuan Sosial: Tinjauan dari Perspektif Sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(2), 100-115.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. (2022). Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sembako. Diakses dari <https://sekda.gresikkab.go.id/3-335-kpm-se-kabupaten-gresik-terima-bansos-pkh-plus-jaslut-tahap-iii-senilai-rp-16-m-pekan-ini/>
- Setiawan, J. (2020). Analisis Dampak Program Sembako di Daerah Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 5(1), 55-70.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.